

RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

AKD: RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Bulan: Juli 2020

Oleh:

GAMBAR

PERPUSTAKAAN DPR RI

Telepon : (021) 5715876, 5715817, 5715887

Fax : (021) 5715846

e-mail: perpustakaan@dpr.go.id

Web: perpustakaan.dpr.go.id

Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (rechtsstaat) bukan berdasarkan kekuasaan. Adapun sistem pengelolaan keuangannya tunduk dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Di dalam Undang-Undang tersebut, diterangkan bahwa Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan atas pengelolaan keuangan Negara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan Negara.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 tahun 2018, perihal pengawasan pada pelaksanaan pengelolaan Keuangan Haji ada pada dewan pengawas. Sejalan dengan itu, UU Nomor 34 Tahun 2014 menyebutkan bahwa dewan pengawas memiliki fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan haji yang memiliki tugas antara lain; melaksanakan penilaian atas rumusan kebijakan, melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan haji, serta menilai dan memberikan pertimbangan terhadap laporan pertanggungjawaban BPKH.

Didalam UU maupun PP telah diatur tata cara pengelolaan keuangan haji dengan beberapa prinsip dasar, antara lain; kehati-hatian, transparansi, kemanfaatan, dan lain-lain. Salah satu prinsip kehati-hatian yang perlu dicermati secara seksama adalah bahwa dalam hal memanfaatkan dana haji dengan mengalihkannya kebidang investasi, haruslah jelas dan nyata statusnya. Jelas halalannya, tidak abu-abu (subhat) apalagi haram. Jangan sampai kesalahan dalam memilih sektor investasi ini nantinya akan mengaburkan kembali status maqasidh al-syari'ah yang bisa saja berujung pada penyuburan praktek ribawi. Karena pada beberapa jenis investasi baik yang secara konvensional maupun yang berbasis syari'ah, keduanya sama-sama memiliki standar take-return yang dapat diukur. Sehingga, pemilihan bidang investasi ini perlu benar-benar menjadi perhatian bersama.

Perbincangan yang ramai mencuat akhir-akhir ini tentang penggunaan dana haji yang tidak sesuai peruntukannya adalah karena pemerintah tidak atau belum pernah menyampaikan "kabar gembira" tersebut secara terbuka dan jelas kepada seluruh umat. Sehingga tidak heran jika rencana tindakan dan pengelolaan yang dikemukakan menjadi perdebatan yang tak kunjung usai. Selalu dipersoalkan dan dicari titik lemahnya. Hal ini sebenarnya berangkat dari kurangnya kepercayaan publik kepada pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan haji.

(Sumber: <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam/article/view/165/75>)

JENIS	KETERANGAN	URL
Berita	RUU PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI DISETUJUI DPR	http://www.dpr.go.id/berita/de \ntail/id/8826
Jurnal	BANK HAJI INDONESIA : OPTIMALISASI PENGELOLAAN DANA HAJI UNTUK KESEJAHTERAAN JAMA'AH HAJI INDONESIA (SEBUAH GAGASAN)	https://journal.uui.ac.id/inde \nx.php/khazanah/article/view/37 \n31
Jurnal	MANAJEMEN PENGELOLAAN DANA HAJI REPUBLIK INDONESIA(STUDI KOLABORASI ANTAR LEMBAGA BPKH, KEMENAG DAN MITRA KEUANGANDALAM PENGELOLAAN DANA HAJI)	http://e-journal.lp2m.uinjam \nbi.ac.id/ojs/index.php/iltizam \n/article/view/165/75
Jurnal	PERSPEKTIF YURIDIS PENGELOLAAN DANA HAJI UNTUK INVESTASI INFRASTRUKTUR	http://berkas.dpr.go.id/puslit \n/files/info_singkat/Info%20Sin \ngkat-IX-15-I-P3DI-Agustus-2017 \n-195.pdf?1593097733
Jurnal	PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI	http://hukum.studentjournal.ub \n.ac.id/index.php/hukum/article \n/view/395/390
Jurnal	TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI PERSPEKTIF	https://dspace.uui.ac.id/bitst \nream/handle/123456789/7271/Jur \nnal%20TINJAUAN%20YURIDIS%20PEN \nGELOLAAN%20KEUANGAN%20HAJI%20P \nERSPEKTIF%20MA%20E1%20B9%20A2LA%20E1%20B \n8%20A4AH.docx.pdf?sequence=2&is \nAllowed=y
Buku	PEMBICARAAN TINGKAT III PEMBAHASAN USUL INISIATIF DPR RI MENGENAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI TAHUN 1998-1999	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=324 \n08&keywords=haji
Buku	PROSES PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI	http://opac.dpr.go.id/catalog/ \nindex.php?p=show_detail&id=254 \n39&keywords=haji
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN BPKH RI NO 3 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA MENENTUKAN KERUGIAN PENEMPATAN DAN/ATAU INVESTASI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI	https://bpkh.go.id/files/stock \ns/Salinan_PBPKH_Nomor_3-2020_T \nentang_Tata_Cara_Menentukan_Ke \nrugian_Penempatan_dan_Investas \ni_dalam_Pengelolaan_Keuangan_H \naji.pdf
Undang-undang & Peraturan	PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI	https://jdih.setkab.go.id/PUUd \noc/175443/PP%20Nomor%205%20Tah \nun%202018.pdf
Undang-undang & Peraturan	PROSES PEMBAHASAN RUU NO 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI	http://dpr.go.id/arsip/indexlg \n/id/764
Undang-undang & Peraturan	PROSES PEMBAHASAN RUU NO. 17 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI	http://berkas.dpr.go.id/armus/ \nfile/Lampiran/leg_1-20181108-0 \n93249-8297.pdf
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI	http://dpr.go.id/jdih/index/id \n/418
Undang-undang & Peraturan	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI	http://dpr.go.id/dokjdih/docum \nent/uu/1616.pdf
Surat kabar	DANA HAJI PERKUAT RUPIAH, MENGAPA TIDAK?	https://portaljember.pikiran-r \nakyat.com/opini/pr-16527319/da \nna-haji-perkuat-rupiah-mengapa \n-tidak
Surat kabar	OPINI: MENINGKATKAN KINERJA PENGELOLAAN DANA HAJI	https://opini.harianjogja.com/ \nread/2019/07/15/543/1005552/op \nni-meningkatkan-kinerja-penge \nlolaan-dana-haji

Surat kabar	OPTIMALISASI PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI	https://nasional.sindonews.com/n/berita/1356274/18/optimalisasi-pengelolaan-keuangan-haji
Surat kabar	SAATNYA MEMAHAMI BIAYA PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI	https://www.krjogja.com/angkri/nngan/opini/saatnya-memahami-biaya-penyelenggaraan-ibadah-haji/
Surat kabar	TELAAH INVESTASI DANA HAJI UNTUK INFRASTRUKTUR UMUM	https://www.harjasaputra.com/online/polhukam/telaah-investasi-dana-haji-ke-infrastruktur-umum.html